

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pelabuhan Perikanan**

*Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di JL. Siliwangi No. 57 Palabuhanratu.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”

Untuk mewujudkan visi tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga
- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplentasikan.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu adalah sebagai berikut:

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan satker dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan satker adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu Adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*d. Piutang
Jangka Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Lainnya

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025		Selisih
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa	1.050.145.000	1.742.872.000	-692.727.000
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	1.050.145.000	1.742.872.000	-692.727.000
BELANJA			
Belanja Pegawai	7.488.083.000	8.988.083.000	1.500.000.000
Belanja Barang	6.291.247.000	5.836.091.000	-455.156.000
Belanja Modal	397.531.000	514.538.000	117.007.000
Belanja Hibah	0	0	0
Jumlah Belanja	14.176.861.000	15.338.712.000	1.161.851.000

Pendapatan
Rp2.513.461.4
41

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.513.461.441,- atau mencapai 144,21 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.742.872.000. Pendapatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan		1.024.515.313	0,00
Pendapatan Jasa	1.742.872.000	1.483.298.128	85,11
Pendapatan Pendidikan	0	0	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda			
	0	5.500.000	0,00
Pendapatan Lain-lain	0	148.000	0,00
Jumlah	1.742.872.000	2.513.461.441	144,21

Realisasi Pendapatan SM 2 TA 2025 dan 2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNB pada SM 2 TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 144,21 persen dari realisasi pendapatan dari PNB TA 2024

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tahun 2025 selain adanya optimalisasi pelaksanaan tarif PP 85 Tahun 2021 juga banyaknya kunjungan kapal perikanan dari daerah lain sehingga jasa tambat labuh mengalami kenaikan serta adanya perubahan penggunaan tanah, gedung dan bangunan menjadi pemanfaatan dimana tarifnya lebih besar

Perbandingan Realisasi PNPB SM 2 TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	1.024.515.313	64.193.736	93,73
Pendapatan Jasa	1.483.298.128	1.657.752.350	-11,76
Pendapatan Pendidikan		0	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda	5.500.000	0	100,00
Pendapatan Lain-lain	148.000	3.200.392	-2062,43
Jumlah	2.513.461.441	1.725.146.478	145,70

Realisasi
Belanja
Rp14.502.287.
065

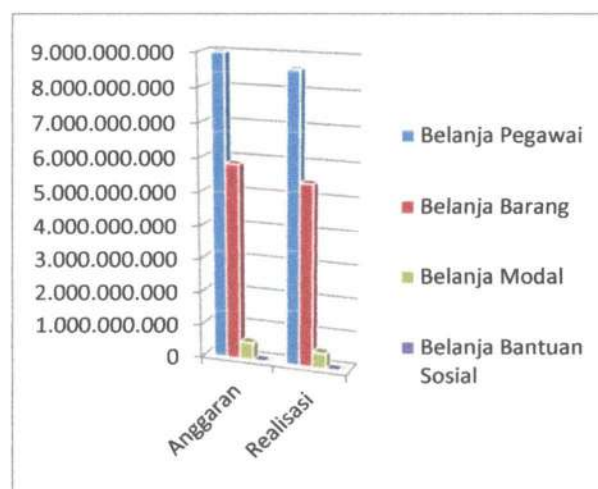
B.2 Belanja

Realisasi belanja Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada Semester 2 Tahun 2025 adalah sebesar Rp.14.502.287.065,- atau 94 persen dari anggaran senilai Rp.15.338.712.000,-. Rincian Anggaran dan realisasi belanja Semester 2 TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja SM 2 TA 2025

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.988.083.000	8.606.995.669	95,76
Belanja Barang	5.836.091.000	5.434.378.715	93,12
Belanja Modal	514.538.000	460.912.681	89,58
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	15.338.712.000	14.502.287.065	94,55
Pengembalian			0,00
Jumlah	15.338.712.000	14.502.287.065	94,55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 14.70 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penghematan dan efisiensi pagu anggaran oleh pemerintah
2. Seluruh pagu belanja modal di tahun 2025 diblokir atau dibintang

Perbandingan Realisasi Belanja SM 2 TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	8.606.995.669	8.030.530.950	7,18
Belanja Barang	5.434.378.715	7.949.772.651	-31,64
Belanja Modal	460.912.681	1.020.525.995	-54,84
Belanja Hibah		0	0,00
Jumlah	14.502.287.065	17.000.829.596	-14,70

Belanja
Pegawai
Rp8.606.995.669

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu pada SM 2 TA 2025 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; Belanja Lembur; dan Belanja Vaksinasi.

Realisasi Belanja Pegawai Semester 2 TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.606.995.669,- dan Rp. 8.030.530.950,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja pegawai TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 7.18 persen dari realisasi belanja TA 2024.

Perbandingan Belanja Pegawai SM 2 TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.574.036.826	4.521.308.165	1,17
Belanja Honorarium	0	0	0,00
Belanja Lembur	3.575.000	10.546.000	-66,10
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	4.032.554.534	3.501.230.587	15,18
Jumlah Belanja Kotor	8.610.166.360	8.033.084.752	7,18
Pengembalian Belanja	3.170.691	2.553.802	24,16
Jumlah Belanja	8.606.995.669	8.030.530.950	7,18

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester 2 TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.434.378.715,- dan Rp. 7.949.772.651,-.

Realisasi Belanja Barang SM 2 2025 mengalami penurunan sebesar 31.64 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024. Hal ini disebabkan menurunnya semua belanja barang antara lain :

- 1 Sebagian besar pagu anggaran kegiatan belanja barang di tahun 2025 terkena dampak adanya penghematan dan efisiensi anggaran dari pemerintah
- 2 Pagu anggaran belanja barang yang tersisa dan adapat digunakan hanya pagu yang berumber dari PNBP itupun kecil nilainya

Perbandingan Belanja Barang SM 2 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	882.326.630	1.140.714.109	-22,65
Belanja Barang Non Operasional	259.807.895	579.564.138	-55,17
Belanja Barang Persediaan	52.064.802	131.584.709	-60,43
Belanja Jasa	3.174.158.301	3.521.121.120	-9,85
Belanja Pemeliharaan	973.972.571	1.733.950.344	-43,83
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	92.048.516	842.838.231	-89,08
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0,00
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto	5.434.378.715	7.949.772.651	-31,64
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0,00
Realisasi Belanja Netto	5.434.378.715	7.949.772.651	-31,64

B.5 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Semester 2 TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Tidak ada belanja hibah di PPN Palabuhanratu

Perbandingan Belanja Hibah SM 2 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Hibah Non Pemilihan	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bruto	0	0	0,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0,00
Realisasi Belanja Netto	0	0	0,00

B.6 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal SM I 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 ,- dan Rp. 1.020.525.995,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi."

Realisasi Belanja Modal pada SM 2 2025 mengalami penurunan sebesar 54.84 %"dibandingkan SM 2 2024 disebabkan :

- 1 Seluruh pagu anggaran belanja modal di Tahun 2025 diblokir

Perbandingan Realisasi Belanja Modal SM 2 2025 dan TA 2024

URAIAN	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.107.742	896.459.995	-56,37
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	124.066.000	-100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	69.804.939	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	460.912.681	1.020.525.995	-54,84
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Jumlah Belanja Bersih	460.912.681	1.020.525.995	-54,84

B.6.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Untuk Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah SM 2 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp391.107.742

B.6.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester 2 TA 2025 dan TA 2024" adalah masing-masing sebesar Rp. 391.107.742,- dan Rp. 896.459.995,-

Realisasi Belanja Modal SM 2 2025 mengalami Penurunan sebesar 56,37 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal SM 2 2024. Hal ini disebabkan sebagian besar belanja modal mengalami efisiensi atau pemblokiran Tahun 2025 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin SM 2 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	391.107.742	896.459.995	-56,37
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	0,00
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan	0	0	0,00
Belanja Modal Perijinan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	391.107.742	896.459.995	-56,37
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Jumlah Belanja Bersih	391.107.742	896.459.995	-56,37

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp.
0,-

B.6.3 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp124.066.000.

Belum ada Realisasi Belanja Modal SM 2 2025 mengalami Penurunan sebesar -100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal SM 2 2024. Hal ini disebabkan belum Terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada Tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan SM 2 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	0,00
Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	0	0	0,00
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama,	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	124.066.000	-100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	124.066.000	-100,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Jumlah Belanja Bersih	0	124.066.000	-100,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp69.804.939

B.6.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SM 2 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.69.804.939,- dan Rp0.

Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami Kenaikan sebesar 100,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024. Hal ini disebabkan belanja modal dilaksanakan pada periode berikutnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan SM 2 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00
Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	69.804.939	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	69.804.939	0	0,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Jumlah Belanja Bersih	69.804.939	0	0,00

B.6.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Lainnya SM 2 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya SM 2 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya SM 2 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SM 2 2025	REALISASI SM 2 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	0	0	
Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Keterangan	TH 2025	TH 2024
1	BPg PPN Palabuhanratu No Rek Mandiri 1820008480006	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		0	0

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

No	Keterangan	TH 2025	TH 2024
1	-	Rp -	Rp -
2	Uang Tunai	Rp -	Rp -
Jumlah		Rp -	Rp -

Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	Rp -	0
Pajak PPh yang Belum Disetor	0	0
Dana Hibah Operasional	Rp -	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	0	0
Pengembalian Belanja belum disetor ke kas negara	0	0
Jumlah	Rp -	-

Piutang
Bukan Pajak
Rp22.553.072

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp22.553.072 dan Rp147.260. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut : Piutang ini merupakan piutang sewa rumah dinas pelabuhan yang digunkan oleh pegawai dan Piutang Pemakaian Listrik oleh para pedagang.

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang PNB	22.031.672	147.260
Piutang Lainnya	521.400	-
Jumlah	22.553.072	147.260

Tuntutan
Ganti Rugi
(TP / TGR)
Rp5.500.000

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.500.000 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar (TP/ TGR)

No	Uraian	TH 2025	TH 2024
1	TGR Kendaraan Roda 2 Motor	5.500.000	-
2		-	-
	Jumlah	5.500.000	-

Bagian
Lancar TPA
Rp. 0,-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TPA adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar (TPA)

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
6		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Bukan
Pajak
Rp112.764

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp112.764 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	22.553.072	0,005%	112.764
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	22.553.072		112.764
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	22.553.072		112.764

Belanja
Dibayar di
Muka
Rp957.081.434

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 957.081.434,- dan Rp. 159.133.987,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:"

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	52.938.902	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	904.142.532	159.133.987
Jumlah	957.081.434	159.133.987

Pendapatan
yang Masih
harus
Diterima
Rp83.278.56
5

C.9 Pendapatan yang Masih harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 83.278.565,- dan Rp.38.079.430 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Tidak ada pendapatan yang masih harus diterima pada periode ini.

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelabuhan	83.278.565	38.079.430
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	0
Jumlah	83.278.565	38.079.430

Persediaan
Rp56.345.63
2

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.56.345.632,- dan Rp.40.986.590,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada t.anggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	56.345.632	40.986.590
Bahan baku	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	56.345.632	40.986.590

Tagihan
TP/TGR
Rp.5.500.00
0,-

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 5.500.000 dan Rp. 0,- . Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1	Suhendra	5.500.000	
2			
Jumlah		5.500.000	0

TPA Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1		0	0
2		0	0
3		0	0
Jumlah		0	0

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih -
Piutang
Jangka
Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp415.089.073.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu per 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp.415.089.073.000,- dan Rp. 415.089.073.000,- atau tidak ada penambahan atas pengadaan tanah maupun nilai kembali nilai tanah pada TA 2024. Aset berupa Tanah tersebut terletak di JL. Siliwangi No. 57 Palabuhanratu.

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	415.089.073.000
Mutasi tambah:		
- Hibah Tanah dari Prov.Jawa Barat	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Beralih menjadi Proverti Investasi	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	415.089.073.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	85916	PPN Palabuhanratu	Rp 415.089.073.000
2			Rp -
3			Rp -
Jumlah			Rp 415.089.073.000

Peralatan
dan Mesin
Rp24.222.198.567
8.567

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.24.222.198.567 dan Rp.24.729.917.838,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	24.033.415.825
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	391.107.742
- hibah	Rp	-
- reklasifikasi dari aset lainnya	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Penghentian aset dari penggunaan	Rp	2.674.502.930
- penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	24.222.198.567
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		22.474.074.347
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	1.748.124.220

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin di periode ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp23.749.191.120
1.120

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.23.749.191.120,- dan Rp.34.230.118.620,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	24.050.439.620
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai/Reklas ke Properti Investasi	Rp	10.712.900.000
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	23.749.191.120
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		5.165.239.821
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	18.583.951.299

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp
Rp39.532.98
5.284

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.39.532.985.284,- dan Rp.39.787.882.345,-. Pada tahun 2025 terjadi mutasi berkurang sebesar Rp324702000. Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	39.787.882.345
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	69.804.939
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	324.702.000
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	39.532.985.284
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		36.906.953.385
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	76.439.938.669

Aset Tetap
Lainnya
Rp49.440.00
0

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.49.440.000,- dan Rp 49.440.000,-.

Aset tetap lainnya tersebut berupa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	49.440.000
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	-
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	49.440.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	49.440.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi
dalam
Pengerjaan
Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. .

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	-
Mutasi tambah:		
- Rehab Berat Ruang Kelas	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Gedung yang sudah selesai	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	-

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp64.546.267.553

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.64.546.267.553,- dan Rp. 64.033.371.236,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24.222.198.567	22.474.074.347	1.748.124.220
2	Gedung dan Bangunan	23.749.191.120	5.165.239.821	18.583.951.299
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.532.985.284	36.906.953.385	2.626.031.899
4	Aset Tetap Lainnya	49.440.000	-	49.440.000
Akumulasi Penyusutan		87.553.814.971	64.546.267.553	23.007.547.418

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp162.419.750

C.23 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp162.419.750 dan Rp.152.402.697.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	152.402.697
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp	10.017.053
Mutasi kurang:		
- koreksi pencatatan nilai	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	162.419.750
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		0
Nilai Buku per 31 Desember 2025	Rp	162.419.750

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
1		Rp -
2		Rp -
3		Rp -
Jumlah		Rp -

Aset Lain-
Lain
Rp391.621.1
60

C.24 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 391.621.160,- dan Rp. 152.402.697,-

Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	152.402.697
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- Aset tetap BMN yang dihentikan penggunaannya	Rp	424.594.053
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	576.996.750
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	Rp	(185.375.590)
Nilai buku per 31 Desember 2025	Rp	391.621.160

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat disajikan sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp185.375.5
90

C.25 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah -Rp185375590 dan -Rp77550000.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	Rp 162.419.750	Rp -	Rp 162.419.750
Aset Lain-lain	Rp 414.577.000	Rp 185.375.590	Rp 229.201.410
Jumlah	Rp 576.996.750	Rp 185.375.590	Rp 391.621.160

Uang Muka
dari KPPN
Rp00.000

C.26 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp218.388.4
97

C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 218.388.497,- dan Rp. 224.469.016,-.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp -	Terdiri gaji induk PNS dan PPPK Bulan Juli 2025
Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 55.968.747	Berupa pembayaran listrik, air dan telepon bulan Desember 2025
Dana direkening penampungan RPATA	Rp 162.419.750	Kontrak Kebersihan dan keamanan termin terakhir
Total	Rp 218.388.497	

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp957.081.4
34

C.28 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 957.081.434 dan Rp.159.133.987,-.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Pendapatan PNBPN diterima dimuka	Rp 957.081.434	
	Total	Rp 957.081.434	

Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp55.968.7
7

C.29 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.55.968.747,- dan Rp. 72.066.319,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Uraian	TH 2025	TH 2024
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp -	Rp -
Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 55.968.747	Rp 72.066.319
Belanja Modal yang masih harus dibayar	Rp -	Rp -
Total	Rp 55.968.747	Rp 72.066.319

Ekuitas
"Rp459.715.
865.861

C.30 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.459.715.865.861,- dan Rp.459.600.696.862.

Pendapatan
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak
Rp1.774.693
.801

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 1.774.693.801,- dan Rp. 1.738.845.112,- Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 2.02 %

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa	Rp 1.774.693.801	Rp 1.738.845.112	2,02
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah	Rp 1.774.693.801	Rp 1.738.845.112	2,02

Beban
Pegawai
Rp8.606.474
.269

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.8.606.474.269,- dan Rp 8.032.537.522,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	3.860.017.328	3.921.117.990	-1,58
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	710.776.807	598.277.673	15,83
Beban Lembur	3.575.000	10.546.000	-194,99
Beban Tunj. Khusus & Beban Pegawai Transito	4.032.105.134	3.502.595.859	13,13
Jumlah	8.606.474.269	8.032.537.522	6,67

Beban
Persediaan
Rp36.705.76
0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 36.705.760,- dan Rp. 153.209.119,-

Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	36.705.760	153.209.119	-317,40
Bahan Untuk Pemeliharaan			0,00
Bahan Suku Cadang			0,00
Bahan Baku			0,00
Persediaan Lainnya			0,00
Jumlah Beban Persediaan	36.705.760	153.209.119	-317,40

Beban
Barang dan
Jasa
Rp4.300.195
.254

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah Sebesar Rp. 4.300.195.254,- dan Rp. 5.199.981.189,-

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk SM 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester 2 Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	SM 2 TH 2025	SM 2 TH 2024	Naik (Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	700.356.480	914.574.109	-30,59
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	464.000	736.000	-58,62
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	100.956.000	108.264.000	-7,24
Beban Barang Operasional Lainnya	80.550.150	117.140.000	-45,42
Beban Bahan	152.703.000	332.849.700	-117,97
Beban Barang Non Operasional Lainnya	107.104.895	220.014.438	-105,42
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	6.886.109	4.778.741	-100,00
Beban Honor Output Kegiatan	0	26.700.000	0,00
Beban Langganan Listrik	619.363.776	905.645.053	-46,22
Beban Langganan Telepon	63.970.119	70.246.908	-9,81
Beban Langganan Air	53.005.920	95.150.240	-79,51
Beban Jasa Profesi	0	7.200.000	0,00
Beban Jasa Lainnya	2.414.834.805	2.381.981.000	1,36
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultan	0	14.701.000	-100,00
Jumlah	4.300.195.254	5.199.981.189	-20,92

Beban
Pemeliharaan
Rp973.972.5
71

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Semester 2 Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp.973.972.571,- dan Rp.1.733.950.344,-.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk SM 2 Tahun 2025 dan 2024 mengalami kenaikan sebesar 32.68 %.

Rincian Beban Pemeliharaan Semester 2 Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	SM I TH 2025	SM I TH 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223.381.983	614.293.370	-175,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	575.970.928	820.964.133	-42,54
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	66.362.500	143.383.500	-116,06
Beban Pemeliharaan Irigasi	59.803.900	28.864.500	51,73
Beban Pemeliharaan Jaringan	48.453.260	126.444.841	-160,96
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0,00
Beban persediaan suku cadang	0	0	0,00
Jumlah	973.972.571	1.733.950.344	-78,03

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp92.048.516

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester 2 Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 92.048.516,- dan Rp. 842.838.231,-

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester 2 Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	SM I TH 2025	SM I TH 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	80.718.866	465.285.088	-476,43
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	111.900.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.329.650	265.653.143	-2.244,76
Jumlah	92.048.516	842.838.231	-815,65

Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester 2 Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat . Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	SM 2 TH 2025	SM 2 TH 2024	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban
Bantuan
Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Semester 2 Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp459.600.696.862

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.459.600.696.862 dan Rp.460.134.599.953,-.

Surplus (Defisit) LO
Rp12.912.901.260

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.12.912.901.260,- dan Rp.15.809.596.982,-.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	Rp -
Suku Cadang	Rp -
Barang Persediaan Lainnya	Rp -
Jumlah	Rp -

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp563.815.315

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp563.815.315 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp -
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 563.815.315
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Rp -
Akumulasi Amortisasi Software	Rp -
Jumlah	Rp 563.815.315

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp10.773. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	Rp -
Koreksi Pendapatan	Rp -
Koreksi Piutang	Rp -
Koreksi Kewajiban	Rp -
Koreksi Hibah	Rp -
Jumlah	Rp -

Transaksi Antar Entitas Rp12.464.254.944

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.12.464.254.944,- dan Rp.15.275.683.118,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Ditagikan Ke Entitas Lain	Rp 14.502.287.065
Diterima Dari Entitas Lain	Rp 2.513.461.441
Transfer Keluar	Rp (5.026.922.882)
Transfer Masuk	Rp 475.429.320
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	Rp -
Pengesahan Hibah Langsung	Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	Rp -
Setoran Surplus BLU	Rp -
Jumlah	Rp 12.464.254.944

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagikan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp.2.513.461.441,- sedangkan DKEL sebesar - Rp.14.502.287.065,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,-.

Penjelasan Transfer Masuk : Hasil analisa neraca Transfer Masuk Aset dari aplikasi Saiba dengan Simak BMN terjadi selisih nilai, hal ini disebabkan adanya nilai penyusutan aset yang dibaca pada aplikasi SAIBA.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		Rp -
2	Gedung dan Bangunan		Rp -
Jumlah			Rp -

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar -Rp5.026.922.882

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-

Tidak ada rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2025

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	Dinas Prov.Jawa Barat	Barang/Tanah (12.800 m ²)	Rp -
2		Uang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Hibah Langsung per 31 Desember 2023			Rp -
Jumlah Pengembalian			Rp -

*Ekuitas
Akhir
Rp459.715.8
65.861*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 459.715.865.861,- dan Rp.459.600.696.862,-.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Penjelasan Pendapatan :
 - 425129 : Pendapatan dari Pemindah tanganan BMN Lainnya: Rp.,-
 - 425131 : Pemanfatan Lahan, Gedung & Bangunan : Rp. 965.386.313,- Rumah Dinas : Rp. 11.429.108 ,-
 - 425151 : Jasa Mobil Truck Crane Rp. 7,350,000,- , Jasa Forklift : Rp. 500,000,- Jasa Mobil Tangki Air Rp.47.485.500, Jasa Tangki BBM dan Instalasi Rp. 8.996.400 ,-. Jasa Pengembangan pelabuhan + Pemeliharaan : Rp. 4.842.240,- Jasa penggunaan bangunan permanen : Rp. 18.453.879,- Jasa penggunaan bangunan semi permanen : Rp.5.729.946 , - Jasa penggunaan Gedung pemasaran ikan : Rp.29.345.050,- Jasa penggunaan lahan terbuka tidak beratap : Rp. 11.464.560 , - Jasa penggunaan lahan terbuka beratap : Rp. 6.837.000 - dan Jasa penggunaan Gedung pertemuan : Rp. , - Rumah Dinas ; Rp, 33.032.692
 - 425621 : Tambat labuh Rp. 485.899.791,- Jasa Masuk Harian : Rp. 206.763.000 ,-, Jasa Masuk Bulanan : Rp. 60.300,000 ,-, Kebersihan Pelabuhan Rp. 53.691.785,-, Kebersihan Kolam : Rp. 36.324.900 ,-, Pengadaan Air Rp. 182.602.136 , - Jasa Bengkel : Rp. 2.300.000,- Pengambilan Gambar : Rp. 2.100.000 , - dan Jasa Pelayanan Listrik Rp. 228.968.141 , -
 - 425132 : Pendapatan sewa peralatan & Mesin : Rp. 56.726.000 , -
 - 425911 : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu : Rp. 148,000,-
 - 425791 : Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain : Rp. 5.500.000,-
 - 425129 : Pendapatan dan Pemindahtangan BMN Lainnya : Rp. 2.403.000,-
2. PENJELASAN PIUTANG LAINNYA (Rp.521.400) :

Piutang ini merupakan pembayaran kembali kelebihan uang PNS, Tunjangan kinerja PNS dan Tunjangan Kinerja PPPK untuk Bulan Desember 2025.
3. PENJELASAN PIUTANG PNBPN (Rp.22.031.672) :

Piutang ini merupakan piutang pemakaian listrik pelabuhan oleh para pengguna yang sudah dibuat tagihannya di tahun 2025 (122 debitur) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 belum melakukan pembayaran.
4. PENJELASAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (Rp.162.419.750) :

Utang ini merupakan transaksi pembuatan SPM RPATA Penampungan terkait kontraktual pengadaan jasa keamanan dan kebersihan termin terakhir.
5. PENJELASAN PENERIMAAN KEMBALI BELANJA PEGAWAI TAHUN LALU (Rp.148.000) :

Merupakan pengembalian kelebihan belanja pegawai berupa uang makan PNS bulan Desember 2025 an. Titin Sumanti dan Dian Nur Rohmah.
6. PENJELASAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA (Rp.5.500.000):

Merupakan nilai penggantian kerugian negara atas hilangnya kendaraan roda 2 motor oleh pegawai an.Suhendra.
7. PENJELASAN BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR (Rp.55.968.747):

Merupakan kewajiban satker yang harus dibayar yaitu pemakaian listrik (Rp.46.087.143), Telepon (Rp.4.986.564) dan Air (Rp.4.895.040) Ub.Desember 2025 yang belum terbayarkan.